

## BAB V

### KESIMPULAN

Terlibatnya militer dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia tidak lepas peran Jenderal A.H.Nasution. Peran Jenderal A.H.Nasution tersebut dituangkan dalam pidatonya yang berjudul “ Jalan Tengah “ pada bulan November 1958, di Akademi Militer Nasional, Magelang. Isi pidato tersebut menyatakan jika posisi ABRI bukanlah sekedar alat sipil seperti di negara-negara Barat, dan juga bukan “ rezim militer “ yang sangat mendominasi kekuasaan seperti di negara Amerika Latin.

Jenderal Nasution ingin ABRI dijadikan salah satu dari banyaknya kekuatan dalam masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan nasib negara dengan cara diberi tempat dalam kelembagaan penting negara atas dasar individu dan bukan organisasi. Setelah mengungkapkan gagasan mengenai “ Jalan Tengah “, selanjutnya pada sidang Dewan Nasional ke-12 dari tanggal 12-21 November 1958 ABRI disahkan sebagai anggota dalam Dewan Perancangan Nasional. Tindakan tersebut merupakan bukti pengakuan pemerintah secara *de facto* sekaligus *de jure* terhadap fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial-politik.

Seiring berjalannya waktu, pada masa Orde Baru muncul suatu doktrin dalam lingkaran militer Indonesia yang diberi nama Dwifungsi ABRI. Doktrin Dwifungsi ABRI diambil dari gagasan “Jalan Tengah” Jenderal A.H.Nasution. Namun dalam

pelaksanaannya, doktrin ini jelas sangat berbeda dari konsep “ Jalan Tengah “. Lewat Doktrin Dwifungsi ABRI, Presiden Soeharto dapat mengendalikan dan menjadikan ABRI sebagai kekuatan sosial-politik yang sangat dominan, termasuk dalam mencampuri urusan partai politik yang pada saat itu sangat tidak disukai oleh Angkatan Darat.

Langkah awal yang dilakukan Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya adalah dengan cara menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Setelah berhasil menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan, fokus Presiden Soeharto adalah melemahkan kekuatan partai-partai politik seperti PNI dan NU dengan dalih demi menjaga stabilitas politik. Kedua partai ini masih memiliki pengaruh dan dukungan massa yang besar. Berbanding terbalik dengan Presiden Soeharto yang tidak memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat seperti Bung Karno. Selain itu, Presiden Soeharto menilai partai politik yang ada saat itu masih memiliki kepentingan lain yang dapat membahayakan negara.

Di dalam melemahkan kekuatan partai politik, Presiden Soeharto kerap kali memerintahkan Angkatan Darat untuk melakukan operasi militer. Menurut peneliti, ada dua cara yang dilakukan pemerintah dalam melemahkan kekuatan partai politik saat itu. *Pertama* untuk ditingkat pimpinan pusat partai Presiden Soeharto sangat mengandalkan Bakin dibawah pimpinan Ali Moertopo dan Mayjen Yoga Soegama. Cara yang dilakukan Ali Moertopo dalam melemahkan kekuatan partai politik diawal berdirinya pemerintah Orde Baru adalah dengan memasukan orang-orang terdekatnya

untuk menciptakan konflik dalam tubuh partai, seperti yang terjadi Parmusi. Saat itu ia memasukan Djaelani Naro dan Imrar Kadir untuk menciptakan konflik di internal Parmusi.

Ketika kesembilan partai politik yang ada pada saat itu melakukan fusi pada tahun 1973, sejak tanggal 12 Februari 1970 rupanya Ali Moertopo telah ditunjuk sebagai “petugas penghubung” partai oleh Presiden Soeharto. Tujuannya adalah sebagai penghubung antar pihak partai dan presiden dengan harapan dapat membantu partai politik dalam menyelesaikan masalah internal. Namun kenyataannya jabatan tersebut dimanfaatkan oleh Ali Moertopo sebagai momentum legitimasi untuk dapat terlibat secara langsung dalam konflik internal PDI. Kehadiran Ali Moertopo dianggap sebagai kekuatan ekstra PDI yang ikut andil dalam konflik internal PDI.

Misalnya ketika terjadi tindakan *reshuffle* Achmad Sukamardidjaja dan kawan-kawan kepada DPP PDI Sanusi-Usep Ranawidjaja. Tindakan yang membuat DPP PDI terbagi menjadi dua kubu, yakni DPP PDI Kongres I dan DPP PDI *Reshuffle* menghadirkan Ali Moertopo untuk terlibat dalam konflik tersebut. Keterlibatan Ali Moertopo muncul ketika kubu Sanusi-Usep (DPP Kongres I) diminta untuk membentuk susunan DPP PDI yang baru, padahal DPP PDI Sanusi adalah DPP PDI yang sah hasil dari Kongres I PDI. Tujuan utama Ali Moertopo adalah untuk menyingkirkan Usep Ranawidjaja karena dianggap anti-Dwifungsi ABRI.

Sedangkan kehadiran Mayjen Yoga Soegama dalam konflik internal PDI awalnya hanya sebagai penengah di antara kubu yang bertikai. Namun terkadang solusi yang dikemukakan oleh Yoga Soegama justru dapat memicu kembalinya konflik internal dalam tubuh PDI. Seperti dalam menyelesaikan konflik antara DPP PDI Kongres I ( Sanusi-Usep ) dengan DPP PDI *Reshuffle* ( Isnaeni-Sunawar). Mayor Jenderal Yoga Soegama meminta DPP PDI yang berkonflik dibubarkan dan digantikan oleh golongan muda partai seperti Soerjadi dan Hardjantho Soerodikromo yang tergabung dalam kubu Munas Pandaan. Kubu Munas Pandaan inilah yang didukung pemerintah. Maka setelah itu muncul konflik baru yang melibatkan golongan tua dengan golongan muda.

Selain kehadiran dua perwira Angkatan Darat yang bertugas di Bakin, muncul juga salah satu jenderal kepercayaan Presiden Soeharto, yakni Laksamana Soedomo. Sama seperti Mayjen Yoga Soegama, Laksamana Soedomo hadir untuk menyelesaikan konflik internal PDI. Namun dalam menyelesaikan konflik tersebut, Laksamana Soedomo kerap kali memberikan jawaban tidak pasti mengenai siapa yang benar dan salah diantara kedua pihak yang berkonflik. Akhirnya konflik terus terjadi sampai pada akhirnya pihak PDI menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah.

*Kedua*, untuk ditingkat daerah/cabang PDI Presiden Soeharto lebih mengandalkan kekuasaan Panglima Daerah setempat untuk melemahkan partai politik daripada mengandalkan Bakin. Tindakan yang dilakukan Panglima Daerah

kerap kali sangat keras, bahkan sampai harus membubarkan organisasi partai seperti kasus PNI di Pulau Sumatera. Sementara yang dilakukan para Panglima Daerah untuk melemahkan kekuatan PDI adalah dengan cara melakukan tekanan-tekanan kepada ketua cabang PDI di daerah menjelang pelaksanaan Kongres PDI. Tujuannya adalah agar para ketua cabang PDI di daerah hadir dalam Kongres PDI dan mendukung calon Ketua Umum PDI yang dikehendaki pemerintah.

Di awal tahun 1990an, muncul beberapa perwira Angkatan Darat aktif maupun Purnawiraman yang justru mendukung PDI. Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan kepada Megawati yang pada saat itu masih sangat minim jam terbang dalam dunia politik. Hal tersebut membuat Megawati adalah orang yang harus disingkirkan dari PDI, agar partai tersebut tidak menjadi partai yang kuat. Munculnya dukungan dari beberapa perwira ABRI membuat kekuatan ABRI terpecah menjadi dua, yakni ABRI Merah Putih dan ABRI Hijau.

Puncak dari campur tangan ABRI dalam konflik internal PDI adalah dengan terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996. Konflik yang melibatkan DPP PDI Megawati dan DPP PDI Soerjadi ini diduga juga melibatkan pihak eksternal partai, khususnya pemerintah dan ABRI. Banyak petinggi-petinggi ABRI yang terlibat dalam kerusuhan, baik dalam menyusun skenario penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro ataupun turun langsung dilapangan untuk memberikan instruksi langsung.

Dampak dari Peristiwa 27 Juli 1996 dirasakan semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, ABRI, PDI dan bahkan masyarakat. Setelah peristiwa tersebut terjadi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang. Sedangkan petinggi ABRI yang dianggap tidak berkontribusi banyak yang dicopot jabatannya. PDI adalah pihak yang paling merasakan dampak dari peristiwa tersebut. Pasca 27 Juli 1996, kekuatan PDI hilang akibat adanya dualisme kepemimpinan. Namun kekuatan PDI terbesar berada dalam genggaman Megawati karena didukung oleh banyak pihak dan massa yang besar. Sedangkan Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI yang diakui pemerintah tidak dapat berbuat banyak.

